



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ARDI**
2. Jabatan : **PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA**
3. NHK : **214338**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 265.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m<sup>2</sup>/48 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
2. Tanah Seluas 300 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
3. Tanah Seluas 20000 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. Tanah Seluas 5000 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA OKU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
5. Tanah Seluas 5000 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA OKU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 45.400.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.400.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 1999, HASIL SENDIRI Rp. 29.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT MATIC Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
4. MOTOR, HONDA VARI 150 CC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 67.440.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 50.861.288



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	428.701.288
III. HUTANG	Rp.	2.500.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	426.201.288

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.